

**PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN
LINGKUNGAN PENGENDALIAN TERHADAP
PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA DI KECAMATAN
BLADO DENGAN PERILAKU ETIS SEBAGAI PEMODERASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

(S. Akun)



Oleh :

KUR'AINI NUR DINIA

NIM : 4318092

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

**PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN
LINGKUNGAN PENGENDALIAN TERHADAP
PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA DI KECAMATAN
BLADO DENGAN PERILAKU ETIS SEBAGAI PEMODERASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

(S. Akun)



Oleh :

KUR'AINI NUR DINIA

NIM : 4318092

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kur'aini Nur Dinia

NIM : 4318092

Judul Skripsi : **Pengaruh *Whistleblowing System* dan Lingkungan Pengendalian Terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Kecamatan Blado Dengan Perilaku Etis Sebagai Pemoderasi.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Maret 2022

Yang Menyatakan,


Kur'aini Nur Dinia

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Rosyid, S.E, M.Si, Akt

Jl. Seroja No. 2 Graha Tirto Asri, Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Kur'aini Nur Dinia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamua'alaikum wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah kripsi Saudara :

Nama : **Kur'aini Nur Dinia**

NIM : **4318092**

Judul Skripsi : **Pengaruh *Whistleblowing System* dan Lingkungan Pengendalian Terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Kecamatan Blado Dengan Perilaku Etis Sebagai Pemoderasi**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk segera dimunaqosahkan.

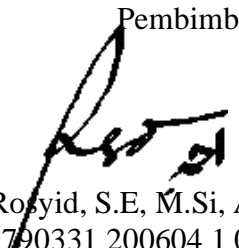
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 8 Maret 2022

Pembimbing


Ahmad Rosyid, S.E, M.Si, Akt
NIP 19790331 200604 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52, Kajen Pekalongan, www.febi.iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : Kur'aini Nur Dinia
NIM : 4318092
Judul Skripsi : Pengaruh *Whistleblowing System* dan Lingkungan Pengendalian Terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Kecamatan Blado Dengan Perilaku Etis Sebagai Pemoderasi

Telah diujikan pada hari jum'at tanggal 8 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji

Penguji I

Ade Gunawan, M.M.
NIP. 19820425201531002

Penguji II

Ina Mutmainnah, M.Ak
NIP. 199203312019032007



Pekalongan, 8 April 2022
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati
NIP. 197502201999032001

MOTTO

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”

- *Al Insyirah 5-6*

“ *Stop picking sticky notes, start taking action*”

- *Merry Riana*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat serta hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun dalam penyusunannya terdapat hambatan serta kekurangan. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya, yang sudah memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak H. Ahmad Rosyid, M.Si.C.A selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah dengan sabar membantu saya dalam penyusunan skripsi.
3. Ibu Alvita Tyas Dwi Aryani, M.Si selaku dosen wali selama saya menjadi mahasiswa.
4. Bapak Ade Gunawan M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Ibu Ria Anisatus Soholihah, S.E.MSA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah.
5. Kepada Bank Indonesia yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan Pendidikan.
6. Almamater IAIN Pekalongan tercinta.

ABSTRAK

Kur'aini Nur Dinia, 2022. Pengaruh *Whistleblowing System* dan Lingkungan Pengendalian terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kecamatan Blado Dengan Perilaku Etis Sebagai Pemoderasi.

Kasus korupsi di pemerintah desa yang semakin meningkat perlu adanya upaya preventif untuk mencegah kenaikan jumlah kasusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *whistleblowing system* dan lingkungan pengendalian terhadap upaya pencegahan korupsi di pemerintah desa dengan perilaku etis sebagai pemoderasinya.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampelnya. Penelitian ini menggunakan data primer dengan mengirimkan kuesioner serta data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi. Dari 144 perangkat desa di masing masing desa di Kecamatan Blado kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan SPSS 26, serta menggunakan *Moderates Regression Analysis* untuk uji regresi pada variabel moderasinya.

Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa *whistleblowing system* dan lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap pencegahan korupsi, serta perilaku etis tidak dapat memoderasi *whistleblowing system* dan lingkungan pengendalian terhadap pencegahan korupsi.

Kata Kunci : *Whistleblowing system*, Lingkungan Pengendalian, Pencegahan Korupsi, Perilaku Etis.

ABSTRACT

Kur'aini Nur Dinia, 2022. The Effect of the Whistleblowing System and Control Environment on Prevention of Corruption in Village Funds in Blado District With Ethical Behavior as Moderators.

The increasing number of corruption cases in the village government requires preventive measures to prevent the increase in the number of cases. This research aims to determine the effect of the whistleblowing system and control environment on efforts to prevent corruption in the village government with ethical behavior as moderating.

This research is a quantitative research using purposive sampling technique in taking the sample. This study uses primary data by sending questionnaires and secondary data obtained from official sources. From 144 village officials in each village in Blado District, an analysis was carried out using SPSS 26, and using Moderates Regression Analysis as a regression test on the moderating variabel.

The test results show that the whistleblowing system and control environment have a significant effect on preventing corruption, and ethical behavior can not moderate the whistleblowing system and control environment for preventing corruption.

Keywords: Whistleblowing system, Control Environment, Corruption Prevention, Ethical Behavior.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada masa penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H Zaenal Mustaqim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan.
3. Dr. Tamammudin, M.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI IAIN Pekalongan.
4. Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan.
5. Ria Anisatus Sholihah, M.S.A., CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah IAIN Pekalongan.
6. H. Ahmad Rosyid, M.Si.CA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Alvita Tyas Dwi Aryani, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
8. Seluruh Dosen Akuntansi Syariah yang telah memberikan tenaga, pikiran, waktu, dan dalam memberikan ilmunya. Kepada Ibu Wilda serta Bapak Novendi selaku dosen Statistik dan Metopen saya. Serta bapak bapak Administrasi Akuntansi Syariah yang telah saya reportkan dalam semua urusan akademik.
9. Pemerintah kecamatan Blado dan seluruh responden penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya dan membantu hingga terselesainya skripsi ini.

10. Ibu Aulia Intani selaku Pembina GenBI Tegal yang selalu memberikan semangat dalam hal pendidikan.
11. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
12. Teman-teman Jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2018 yang telah menjadi keluarga baru saya selama berkuliah.
13. Kepada teman teman GenBI Tegal Komisariat IAIN Pekalongan tahun 2020 dan 2021 yang telah memberikan dukungan dalam menyusun skripsi ini. Dan tak lupa kepada teman teman Akuntansi Syariah 2018 yang saya cintai dan saya banggakan.
14. Sahabat saya (Mas Bagas, Mbak Utami, Ayin, Ulfa, Rafita, Lilim, Maulida, Ismi, Farekha, Mbak Elok) dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Serta kawan kawan KKN SID Blora, yang telah menjadi teman berkeluh kesah (Irul, Soleh, Liyut, Atma).

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membant. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 23 Maret 2022



Kur'aini Nur Dinia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Landasan Teori	13
B. Telaah Pustaka.....	21
C. Kerangka Berpikir	27
D. Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Setting Penelitian.....	33
D. Populasi Dan Sampel	33
E. Variabel Penelitian	36
F. Definisi Operasional.....	37

G.	Sumber Data	39
H.	Teknik Pengumpulan Data.....	39
I.	Metode Analisis Data	40
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	45
A.	Gambaran Umum dan Objek Penelitian	45
B.	Hasil Penelitian.....	48
C.	Pembahasan	63
BAB V	PENUTUP.....	70
A.	Simpulan	70
B.	Keterbatasan Penelitian.....	71
C.	Implikasi.....	71
D.	Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah mengalokasikan APBN kepada pemerintah desa sejak tahun 2015. Anggaran ini yang kemudian disebut dengan dana desa yang diharapkan dapat bermanfaat bagi desa dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban keuangan desa. (Jayanti and Suardana, 2019) Pedoman mengelola keuangan dalam desahy diatur dalam Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Tabel 1. 1

Alokasi Anggaran Dana Desa Tahun 2018-2020

Tahun	Alokasi	Rata rata DD/ Tahun	Realisasi	Persen
2018	Rp.60.000.000. 000.000	Rp. 800.400.000	Rp.59.860.000. 000	98,77%.
2019	Rp.70.000.000. 000.000	Rp. 933.900.000	Rp.42.200.000. 000	60,29%.
2020	Rp.72.000.000. 000.000	Rp. 960.600.000	-	-

Sumber : BPKP 2020

Hasil dari survei *fraud* ACFE pada tahun 2019 memperoleh hasil bahwa sektor pemerintahan menempati posisi kedua pada kategori industri yang paling dirugikan karena *Fraud*. *Fraud* merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang secara sengaja atau kecurangan untuk memperoleh suatu keuntungan dengan menyalahgunakan jabatan, penggunaan asset atau sumber daya lain. (Bernardin and Solihat, 2019)

Fraud terbagi kedalam 3 bentuk, yaitu fraud laporan keuangan, fraud penyalahgunaan aset serta fraud korupsi..

Tabel 1. 2

Jenis Industri Yang Paling Dirugikan Karena *Fraud*

No.	Jenis <i>Fraud</i>	Persentase
1.	Industri keuanan dan perbankan	41,4%
2.	Pemerintahan	39,9 %
3.	industri pertambangan	5,0 %
4.	Industri Kesehatan	4,2%
5.	Industri manufaktur	4,2%
6.	Industri lainnya	3,7 %
7.	Industri transportasi	2,1 %
8.	Industri perumahan	1,7 %
9.	Industri Pendidikan	1,7%
10.	Industri perhotelan dan pariwisata	1,3%
11.	Industri perikanan dan kelautan	0,8%

Sumber : ACFE, 2019

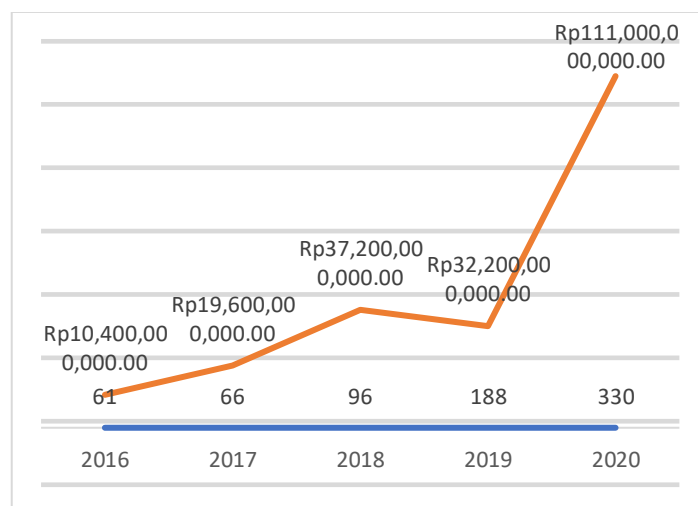
Berdasarkan table diatas, dapat kita ketahui bahwasannya tingkat kecurangan di sektor pemerintahan berada pada peringkat kedua yaitu sebesar 39,9%. Pemerintah sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh masyarakat dalam menjalankan pemerintahan serta mendapatkan tanggung jawab dalam merealisasikan anggaran seharusnya dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Melihat hasil dari ACFE bahwa pemerintahan berada di peringkat kedua dalam industri yang paling dirugikan oleh *fraud*, maka hal ini perlu kita kaji lebih lanjut bagaimana cara menanganinya. Penelitian mengenai cara cara yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan perlu dilakukan.

Besarnya dana desa yang digelontorkan setiap tahun beriringan dengan meningkatnya kasus korupsi di lingkungan pemerintah desa. Pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada korupsi pada lingkup korupsi di desa menyimpulkan bahwa kasus bertambah kurang lebih dua kali lipat setiap tahunnya. Pada 2015 terdapat 17 kasus, bertambah menjadi 61 kasus pada 2016, dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 66 kasus. Total kasus korupsi pada tahun 2015 - 2017 telah mencapai 144 kasus. Kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi dalam lingkungan pemerintah desa juga besar, yaitu mencapai Rp 47.560.000.000. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 9.120.000.000, tahun 2016 sebesar Rp. 10.400.000.000, dan pada tahun 2017 mencapai Rp. 19.600.000.000. (ICW and Indonesia, 2018).

Berdasarkan data terbaru dari hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) kasus korupsi dana desa di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berikut grafik kenaikan kasus korupsi dana desa di Indonesia :

Gambar 1. 1

Peningkatan Kasus Korupsi Dana Desa Di Indonesia



Sumber : ICW 2021

Dari grafik diatas dapat kita ketahui bahwa kasus korupsi dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terlebih lagi pada tahun 2020 yang mengalami peningkatan paling tinggi. Selama tahun 2018 beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi di kabupaten Batang telah ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Batang, salah satunya adalah korupsi dana desa. Kasus korupsi yang masih cukup deras diperbincangkan adalah penangkapan mantan kepala desa Bismo tahun periode 2013-2019. Penangkapan ini dilakukan pada akhir tahun 2020, dimana mantan kepala desa ini melakukan korupsi anggaran dana desa tahun 2017, 2018, dan 2019 tahap 1. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 741.058.834, dengan modus setelah uang dicairkan dari kas desa semua di minta oleh pelaku, sehingga semua pengadaan barang diatur sendiri oleh pelaku.(Bidiknasional, 2020)

Bedasarkan data-data diatas, nampaknya kasus korupsi dana desa bukanlah masalah yang sepele. Kerugian yang dialami oleh negara akibat korupsi dana desa tidaklah sedikit, oleh karena itu korupsi dana desa perlu kita cari upaya penyelesaiannya. Pemerintah merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan untuk pembangunan nyatanya belum berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu perlu dilakukan upaya upaya pencegahan yang dapat meminimalisir terjadinya korupsi dana desa, sehingga pelaksanaan pembangunan desa menjadi lebih optimal. Sebagaimana tujuan dana desa adalah untuk membangun desa supaya menjadi desa yang lebih maju dan makmur.

Dalam islam, menggelapkan uang negara disebut dengan Al-ghulul.(Suradi, 2014) Dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai pemerintahan, pemerintah desa diharuskan untuk berlaku secara adil dan membagikan segala sesuatu kepada yang berhak. Mengambil sesuatu walaupun itu hanyalah sehelai benang tetaplah sustu perbuatan yang tidak baik dan dilarang. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam H.R. Ahmad dan Abu Daud yang artinya :

“Sampaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu”(Saifuddin, 2017)

Selain itu diriwayatkan juga dalam HR. At-Tirmidzi bahwa mengambil sesuatu tanpa izin pihak yang berhak adalah dilarang:

“Bersumber dari Muadz bin Jabal yang berkata, “Rasulullah Saw telah mengutus saya ke Negeri Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka saya pun kembali. Nabi bersabda, Apakah engkau mengetahui mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apa pun tanpa izin saya, karena hal itu adalah **Ghulul** (korupsi). Barang siapa melakukan ghulul, ia akan membawa barang ghulul itu pada hari kiamat. Untuk itu saya memanggilmu, dan sekarang berangkatlah untuk tugasmu.””

Melalui hadis diatas kita menjadi tahu bahwa perlu adanya upaya untuk mencegah korupsi, baik sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana cara untuk mencegah terjadinya korupsi dalam sektor pemerintahan. Arens (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dengan penerapan system dan pengendalian internal *antifraud* sesuai dengan budaya yang dianut oleh organisasi terkait adalah cara paling efektif untuk mencegah kecurangan. Memperkuat perilaku positif yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh pekerja dapat diwujudkan dengan memperkuat implementasi nilai nilai inti tersebut. Terciptanya budaya kejujuran dan etika dalam bekerja merupakan salah satu hasil dari program *antifraud* .(Arens, Elder and Beasley, 2014) Program *antifraud* diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan sebagai contoh utama, memberikan contoh dalam berperilaku yang bermoral, etis, jujur, dan bertanggung jawab.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang positif. Terciptanya lingkungan kerja yang berjalan sebagaimana mestinya, memberikan kenyamanan dalam bekerja, dan tidak otoriter akan meningkatkan kinerja pegawai.
3. Pelatihan program dan pelatihan etis berperilaku. Pegawai diberikan pelatihan mengenai kode etiknya masing-masing, diberikan informasi secara jelas bagaimana cara melaporkan kecurangan yang terjadi, dan melalui media apa untuk menyalurkannya.

4. Tegass dan disiplin. Apabila terjadi kecurangan maka perlu dilakukan tindak lanjut dari kasus tersebut, diantaranya adalah melakukan investigasi lebih lanjut, memberikan sanksi tegas, dan evaluasi.

Sebagai upaya untuk pelaporan korupsi yang terjadi, maka media laporan dan keberanian karyawan dalam mengungkapkan suatu kecurangan perlu diberikan wadah. Dalam Perbup No. 37 Tahun 2013 sudah diatur mengenai pedoman pelaksanaan sistem pengaduan (*whistleblower system*) tindak pidana korupsi di Kabupaten Batang, dan dalam pengaduan penyalahgunaan dana desa sudah disediakan platform pengaduan oleh Kementerian desa PDTT, serta Kemendagri.

Penggunaan *whistleblowing system* sebagai upaya pencegahan korupsi ini sejalan dengan KNKG yang menyatakan bahwa memberantas korupsi, dan praktik kecurangan lainnya lebih efektif dicegah dan diperangi melalui *Whistleblowing system*. Efektifitas ini disimpulkan berdasarkan total kasus yang telah berhasil di deteksi serta waktu penindakan yang relative singkat. Oleh karena itu peneliti menggunakan *whistleblowing system* sebagai salah satu media pencegahan korupsi. Adapun pihak yang memberikan informasi adanya kecurangan disebut dengan *whistleblower* serta mendapat jaminan kerahasiaan identitas sebagai *whistleblower*. Sebagaimana yang disampaikan oleh KNKG bahwa jumlah kasus yang ditangani dengan *whistleblowing system* dapat ditangani dalam waktu yang relatif singkat, maka optimalisasi *whistleblowing system* bisa menjadi salah satu pencegah dari adanya korupsi dana desa.

Melalui penelitian ini, peneliti akan menganalisis apakah *whistleblowing system* mempunyai pengaruh terhadap pencegahan korupsi dalam lingkungan pemerintah desa. Dalam penelitian Katarina (2016) menyimpulkan hasil bahwa *Whistleblowing system* dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan di pemerintah desa. Sejalan dengan penelitian Ni Putu (2017) yang memperoleh hasil bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan,

Endang (2018) menjelaskan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan, Deden (2019), Luh Sri (2019), Faridatul (2020), Romadaniati (2020) memperoleh hasil penelitian bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian – penelitian tersebut, *whistleblowing system* dapat digunakan dalam upaya pencegahan *fraud* atau kecurangan yang dalam penelitian ini adalah korupsi. Akan tetapi, hasil berbeda diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nur Cahyo and Sulhani, 2017) bahwasannya pencegahan kecurangan dengan menggunakan *whistleblowing system* tidak optimal. Dalam bukunya Somers and Casal, (2011) menguraikan bahwasannya *whistleblowing system* tidak efektif dalam mencegah kecurangan karena pegawai lebih memilih untuk membiarkan kesalahan terjadi (*wrongdoing*). Sujana, Suardikha and Laksmi, (2020) dalam penelitiannya mengenai pencegahan kecurangan di pengelolaan keuangan desa, diperoleh hasil bahwa *whistleblowing system* tidak mempunyai pengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh Inawati and Sabila, (2021) bahwa *whistleblowing system* tidak mempunyai pengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Dalam upaya pencegahan korupsi, selain dengan menerapkan *whistleblowing system*, perlu adanya lingkungan pengendalian yang baik pada masing-masing pemerintah desa. Sebagaimana dalam upaya *antifraud* yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan adanya lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif akan terbentuk apabila kode etik dan perilaku etis berjalan dengan baik, serta pembagian kerja dan tanggung jawab yang sesuai dengan kapasitas masing masing pegawai. Semakin baik lingkungan pengendalian itu terwujud maka pencegahan korupsi yang dalam hal ini adalah sektor pemerintahan akan bisa berjalan dengan maksimal.

Jika melihat dari kenaikan kasus kasus korupsi yang sudah dijelaskan diatas, perlu adanya lingkungan pengendalian yang baik untuk mencegah

adanya korupsi dana desa. Penelitian yang dilakukan Tunggal (2016) dalam Chairun Nisak (2018) mengatakan bahwa lingkungan pengendalian dapat disebut sebagai dasar sebuah organisasi, sebab lingkungan pengendalian berkaitan dengan pengelolaan atau pengawasan terhadap penerapan integritas. Pengendalian internal yang lemah akan dapat memicu adanya suatu kecurangan. Maka dari itu perlu adanya pengendalian yang baik untuk mengantisipasi adanya penggelapan, pencurian, serta penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. (Kurniawan and Izzaty, 2019). Penelitian yang telah dilakukan oleh Laila (2018) dan Rizal (2020) mengenai pengaruh antara lingkungan pengendalian terhadap pencegahan kecurangan, diperoleh hasil bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan. Akan tetapi hasil yang berbeda diperoleh Agung (2016), dalam penelitiannya menyatakan bahwa lingkungan pengendalian tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan. Hasil yang bertentangan juga diperoleh Endrik, (2017) bahwasanya lingkungan pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan korupsi. Begitu pula dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Akhyaar *et al.*, 2022), bahwa control internal yang mencakup lingkungan pengendalian tidak berpengaruh dalam pencegahan kecurangan dalam manajemen keuangan desa.

Upaya pencegahan korupsi dengan *whistleblowing system* tentunya masih bisa dipengaruhi oleh faktor lain yang bisa memperkuat ataupun memperlemah pengaruhnya dalam pencegahan korupsi. Selain dari segi regulasi dan pengendaliannya, *whistleblowing system* bisa menjadi semakin efektif dalam memberantas kecurangan apabila pegawai ataupun orang yang mengetahui adanya kecurangan bersedia menjadi seorang *whistleblower*. Faktor dari dalam diri individu atau yang menjadi pedoman seseorang untuk berperilaku secara umum kita sebut sebagai perilaku etis. Perilaku etis secara umum didefinisikan sebagai perilaku yang diterima secara general mengenai perilaku yang baik dan benar, sesuai dengan norma sosial yang ada. Perilaku etis dapat menggambarkan kepribadian individu, faktor eksternal dan faktor internal yang dihadapi individu akan mempengaruhi kualitasnya dalam

berperilaku. Penelitian Gaurina et al., (2017) memperoleh hasil bahwa persepsi karyawan terhadap perilaku etis berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian mengenai perilaku etis sebagai pemoderasi pencegahan korupsi dana desa belum pernah diteliti sebelumnya. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi temuan terbaru dalam penelitian mengenai pencegahan korupsi dana desa.

Pengaruh perilaku etis sebagai pemoderasi lingkungan pengendalian juga perlu dianalisis lebih lanjut.. Memaksimalkan pencegahan korupsi dana desa dengan lingkungan kerja yang positif maka perlu ada bekal dari masing masing individu untuk berperilaku secara etis. Arens dan Loebbecke (1997:73) dalam Adeline (2013) menjelaskan bahwasannya orang cenderung berperilaku tidak etis dikarenakan perbedaan standar etika dengan masyarakat pada umumnya, serta tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk menguntungkan dirinya sendiri. Penelitian Gaurina et al., (2017) memperoleh hasil bahwa persepsi karyawan terhadap perilaku etis berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sebagai pemoderasi, perilaku etis bisa saja memperkuat atau memperlemah pengaruh dari lingkungan pengendalian terhadap pencegahan korupsi. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa perilaku etis merupakan faktor dari dalam individu yang berpengaruh terhadap Tindakan yang dilakukannya. Sehingga, pemilihan perilaku etis sebagai pemoderasi bisa menghasilkan informasi baru dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian mengenai korupsi dana desa yang terjadi, serta perlunya untuk mencegah korupsi di pemerintahan desa, peneliti memutuskan untuk meneliti *whistleblowing system* dan lingkungan pengendalian terhadap pencegahan korupsi di kecamatan Blado dengan perilaku etis sebagai pemoderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penambahan variabel lingkungan pengendalian, objek penelitian, serta penambahan variabel moderasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Gaurina, Purnamawati and Atmadja, (2017), perilaku etis digunakan sebagai variabel independen serta objek penelitian dilakukan di Bali Hai Cruises.

Dari fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Whistleblowing system* dan Lingkungan Pengendalian Terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Kecamatan Blado Dengan Perilaku Etis Sebagai Pemoderasi”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan penjelasan dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, peneliti menyusun rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Apakah *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kecamatan Blado?
2. Apakah Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kecamatan Blado?
3. Apakah Perilaku Etis memoderasi *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kecamatan Blado?
4. Apakah Perilaku Etis memoderasi Lingkungan Pengendalian terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kecamatan Blado?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Rumusan diatas bermaksud untuk mencapai tujuan penelitian yaitu berikut :

1. Untuk menganalisis apakah *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kecamatan Blado.
2. Untuk menganalisis apakah Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kecamatan Blado.
3. Untuk menganalisis apakah Perilaku Etis dapat memoderasi *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kecamatan Blado.

4. Untuk menganalisis apakah Perilaku Etis dapat memoderasi Lingkungan Pengendalian terhadap Pencegaha Korupsi Dana Desa di Kecamatan Blado.

Berdasarkan rumusan dan tujuan yang dicapai, semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada peneliti lainnya serta bagi pemerintahan.

1. Manfaat teoritis :

Meningkatkan pemahaman mengenai peranan *whistleblowing system* dan lingkungan pengendalian terhadap pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah. Serta dapat digunakan sebagai bahan pengembangan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi referensi penelitian di masa mendatang.

2. Manfaat praktis :

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menyumbangkan kontribusi di bidang keilmuan dan atau berperan dalam pelaksanaan riset dimasa yang akan datang mengenai pencegahan korupsi di pemerintah desa.

- b. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu perwujudan dari pengimplementasian ilmu pengetahuan mengenai pencegahan korupsi.

- c. Bagi pemerintah desa

Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah desa tentang upaya pencegahan korupsi agar tercipta pemerintahan desa yang transparan dan berintegritas.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini dijelaskan melalui 5 bab, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, sehingga dapat mempermudah peneliti serta pihak yang menggunakan penelitian ini dalam memahami penelitian yang dilaksanakan. Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaannya akan dibahas di dalam sub bab pendahuluan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori , telaah Pustaka, kerangka berpikir serta hipotesis akan dibahas pada bab ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan, dimana penelitian akan dilaksanakan, pendekatan yang akan digunakan, jenis penelitian, variabel yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, definisi tiap variabel yang akan diteliti, keseluruhan dari populasi serta sampel yang digunakan, sumber data, serta pengujian-pengujian statistic yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Rangkuman hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian dibahas pada sub bab analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini akan diuraikan simpulan dan keterbatasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh dari *whistleblowing system* dan lingkungan pengendalian terhadap pencegahan korupsi dana desa dengan perilaku etis sebagai pemoderasinya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang ada di kecamatan Blado, kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan sampel penelitian ini adalah perangkat desa diantaranya sekretaris desa, KAUR, KASI, serta Kadus di masing masing desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Kecamatan Blado. Semakin banyak *whistleblower*, maka penerapan *Whistleblowing system* akan menjadi lebih maksimal. Dengan maksimalnya *Whistleblowing system* maka kasus korupsi dana desa akan lebih mudah terdeteksi sejak dini. Laporan dapat diproses lebih cepat dan kerugian yang lebih besar bisa dicegah, sehingga dana desa dapat digunakan sebagaimana mestinya .
2. Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Pencegahan Korupsi di Pemerintah Desa Se Kecamatan Blado. Semakin baik lingkungan pengendalian pada pemerintahan desa, maka potensi kecurangan dapat diminimalisir. Sehingga pencegahan korupsi dana desa dapat dilakukan sejak dini dari internal pemerintahan desa. Semakin baik perwujudan Lingkungan Pengendalian maka Korupsi Dana Desa dapat dicegah .
3. Perilaku Etis tidak bisa memoderasi *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan Korupsi di Pemerintah Desa Se Kecamatan Blado.

Berdasarkan hasil data yang telah dianalisis, variabel Perilaku Etis tidak mampu memoderasi karena variabel *Whistleblowing System* telah berpengaruh signifikan tanpa adanya faktor yang memoderasi. Dari hasil uji penentuan jenis moderasi, variabel Perilaku Etis termasuk kategori Moderasi Predictor artinya hanya mampu menjadi variabel independen saja.

4. Perilaku Etis tidak mampu memoderasi Lingkungan Pengendalian terhadap Pencegahan Korupsi di Pemerintah Desa Se Kecamatan Blado. Berdasarkan hasil data yang telah dianalisis, variabel Perilaku Etis tidak mampu memoderasi karena variabel Lingkungan Pengendalian telah berpengaruh signifikan tanpa adanya faktor yang memoderasi. Dari hasil uji penentuan jenis moderasi, variabel Perilaku Etis termasuk kategori Moderasi Predictor artinya hanya mampu menjadi variabel independen saja.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam Menyusun penelitian ini masih terdapat keterbatasan, diantaranya :

1. Penelitian hanya dilakukan di pemerintah desa se kecamatan Blado.
2. Sampel dalam penelitian ini hanya perangkat desa, tanpa melibatkan aparat desa.
3. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu *whistleblowing system* dan lingkungan pengendalian.
4. Tidak dilakukan wawancara kepada sampel secara terstruktur.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan mengenai teori agensi dan teori motivasi. Teori agensi berusaha untuk memahami antara principal atau masyarakat dengan agen atau pemerintah desa.

Dalam teori ini terdapat permasalahan kepentingan termasuk di dalamnya korupsi, sehingga selain upaya penyelesaian perlu adanya pengkajian terhadap upaya pencegahan. Selain itu dalam peningkatan kinerja sebagaimana dalam teori motivasi, perlu adanya pengetahuan terkait dengan faktor faktor yang mendukungnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menguji *whistleblowing system*, lingkungan pengendalian terhadap pencegahan korupsi serta perilaku etis. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai teori agensi dan teori motivasi yang berhubungan dengan sektor pemerintahan.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini terkait dengan kasus korupsi yang ada di pemerintah desa. Melalui pengujian hipotesis terhadap pencegahan korupsi diperoleh hasil yang dapat memberikan gambaran mengenai upaya upaya pencegahannya. Sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bebas dari suatu kecurangan, memberikan motivasi perangkat desa dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta masih adanya keterbatasan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai :

1. Bagi pemerintah desa di kecamatan Blado dapat meningkatkan lagi pemahaman mengenai *whistleblowing system* serta lingkungan pengendalian yang baik, supaya upaya pencegahan korupsi dapat berjalan dengan lebih optimal
2. Bagi mahasiswa ataupun peneliti selanjutnya supaya dapat mengkaji lebih mendalam dengan melakukan wawancara terstruktur kepada responden, menambah variabel lain yang berhubungan dengan upaya pencegahan korupsi, serta dapat menambah kategori sampel penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyaar, K. *et al.* (2022) ‘Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa’, *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), pp. 202–217. Available at: <https://ejournal.warmadewa.id/index.php/krisna/article/view/4184>.
- Arens, A. A., Elder, R. J. and Beasley, M. S. (2014) *Auditing and Assurance Service, Book1*.
- Batang, B. (2017) *Kecamatan Blado dalam Angka*. Batang.
- BATANG, P. (2013) ‘PERBUP NO 37 TH 2013’. Batang.
- Bernardin, D. E. Y. and Solihat, I. (2019) ‘Internal whistleblowing sebagai upaya pencegahan fraud dengan moralitas sebagai pemoderasi’, *Jurnal Sain Manajemen, Vol.1 No.1 Agustus 2019*, 1(1), pp. 107–119.
- Bidiknasional (2020) ‘No Title’, 30 December. Available at: <https://bidiknasional.com/2020/12/diduga-korupsi-dana-desa-mantan-kades-ditangkap-polisi/>.
- Endrik, A. (2017) ‘RJOAS, 5(65), May 2017’, 5(May), pp. 107–115.
- Fajar, I. (2016) ‘Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal dengan coso’.
- Gaurina, N. P. M., Purnamawati, I. G. A. and Atmadja, A. T. (2017) ‘Pengaruh persepsi karyawan mengenai perilaku etis dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud (studi kasus pada Bali Hai Cruises)’, *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 8(2 Tahun 2017), pp. 1–9.
- hindayati mustafidah, M.Kom, suwarsito, M. S. (2020) *dasar dasar metodologi penelitian*. 1st edn. Edited by totok haryanto. purwokerto: um purwokerto press.
- ICW and Indonesia (2018) *Lonjakan Korupsi di Desa / ICW, indonesia corruption watch*. Available at: <https://www.antikorupsi.org/id/article/lonjakan-korupsi-di-desa> (Accessed: 15 December 2021).
- Inawati, W. A. and Sabila, F. H. (2021) ‘Pencegahan Fraud: Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah’, *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), p. 731. doi:

10.24843/eja.2021.v31.i03.p16.

- Ir. Syofian Siregar, M. . (2013a) *metode penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan spss*. 1st edn. JAKARTA: kencana prenda media group.
- Ir. Syofian Siregar, M. . (2013b) *metode penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*. jakarta: prenda media.
- Ir. Syofian Siregar, M. . (2013c) *metode penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan mnaual dan SPSS*. 1st edn. Edited by prenda media. Jakarta.
- Jayanti, L. S. I. D. and Suardana, K. A. (2019) ‘Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa’, *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), p. 1117. doi: 10.24843/eja.2019.v29.i03.p16.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2008) ‘Pedoman 2008’, p. 3. Available at: <http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-WBS.pdf>.
- Kristanti (2018) ‘Pengaruh Personal Cost dan Lingkungan Etika terhadap Niat Melakukan Whistleblowing dengan Locus Of Control sebagai Variabel Moderasi’, pp. 84–92.
- Kurniawan, P. C. and Izzaty, K. N. (2019) ‘PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGENDALIAN Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang terjadi karena ada faktor tekanan , kesempatan (peluang), dan rasionalisasi yang dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya yang bera’, 1(1), pp. 55–60.
- Langoday, katarina S. M. E. (2021) ‘PENGARUH WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN’.
- Ngatno (2015) ‘Buku Ajar Metodologi’, p. 47. Available at: https://doc-pak.undip.ac.id/331/1/BUKU_AJAR_METODOLOGI_PENELITIAN.pdf.
- Noviani, D. P. and Sambharakreshna, Y. (2014) ‘Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan’, *JAFFA Oktober*, 02(2), pp. 61–70.
- Nur Cahyo, M. and Sulhani, S. (2017) ‘Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan dan Reaksi Pasar’, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), pp. 249–270. doi: 10.24815/jdab.v4i2.7704.

- Octaviari, V. (2015) 'Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Perilaku Etis Sebagai Variabel Intervening Pada Pt Pagilaran', *Skripsi*, 151, p. 167.
- Puspitarani, D. *et al.* (2019) 'PENGARUH IC DAN SOP TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DENGAN PENALARAN ETIS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)'
- Rahadi, D. R. and Farid, M. M. (2021) *Monograf Analisis Variabel Moderating*.
- Rahimah1), L. N., Murni2), Y. and Lysandra3), S. (2018) 'PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DESA, LINGKUNGAN PENGENDALIAN dan MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD YANG TERJADI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaesmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan', 42(1), pp. 31–41.
- Regina Azaria (2020) 'Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, moralitas, system pengendalian internal dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa (studi empiris aparat pemerinta desa kabupaten kudas)', (July), pp. 1–23.
- Romadaniati (2020) 'Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi THE INFLUENCE OF VILLAGE APARATURE COMPETENCE , INTERNAL CONTROL SYSTEM AND WHISTLEBLOWING SYSTEM ON FRAUD PREVENTION IN VILLAGE GOVERNMENT WI', (October).
- rozmita dewi yr (2017) *fraud, penyebab dan pencegahannya*. 1st edn. bandung: alfabeta cv.
- Saifuddin (2017) 'Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia', *Az Zarqa*, 9(2), pp. 256–277.
- Sandityas, Y., Ngumar, S. and Riharjo, I. B. (2018) 'Faktor-Faktor Penentu Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Pemoderasi', *Academia.Edu*. Available at: https://www.academia.edu/download/56057412/PUBLIKASI_KARYA_ILMIAH_YULIUS_SANDITYAS.pdf.
- Satria, M. R. (2020) 'Pengaruh Lingkungan Pengendalian Dan Penilaian Risiko Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Pstnt Batan Bandung', *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), pp. 165–169. doi: 10.31294/moneter.v7i2.8515.

- Siregar, M. I. S. (2013) 'data dan pengumpulan data', in *metode penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan spss*. pertama. jakarta, p. 21.
- Somers, M. and Casal, J. C. (2011) 'Type of wrongdoing and whistle-blowing: Further evidence that type of wrongdoing affects the whistle-blowing process', *Public Personnel Management*, 40(2), pp. 151–163. doi: 10.1177/009102601104000205.
- Sudaryono, D. (2017a) 'metodologi penelitian', in *metodologi penelitian*. jakarta: PT RajaGrafindo, p. 92.
- Sudaryono, D. (2017b) 'metodologi penelitian', in *metodologi penelitian*. 1st edn. jakarta: PT RajaGrafindo, p. 167.
- Sudaryono, D. (2017c) 'metodologi penelitian', in *metodologi penelitian*. 1st edn. jakarta: PT RajaGrafindo, p. 155.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S. and Laksmi, P. S. P. (2020) 'Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar', *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), p. 2780. doi: 10.24843/eja.2020.v30.i11.p06.
- Suradi (2014) *KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM, KEMENKEU*. Available at: <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-kepemimpinan-magelang-korupsi-menurut-hukum-islam-2019-11-05-9bb24de7/> (Accessed: 26 December 2021).
- Utami, K. D., Utami, I. and Hapsari, A. N. S. (2019) 'Whistleblowing pengelolaan dana desa: studi atas nilai kearifan lokal', *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(17), pp. 571–579.
- Wardana, I. G. A. K., Sujana, E. and Wahyuni, M. A. (2017) 'Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng', *E-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), pp. 1–10.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T. and Atmadja, A. T. (2017) 'Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng)', *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), pp. 1–12.
- Wijayanti, P. and Hanafi, R. (2018) 'Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), pp. 331–345.

- William R Scott (2019) 'Agency Theory (William R Scott) Dalam', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Zarefar, A., Bisnis, T. A.-J. A. K. D. and 2017, undefined (2017) 'Efektifitas Whistleblowing System Internal', *Jurnal.Pcr.Ac.Id*, 10(2), pp. 25–33. Available at: <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/1562>.
- Akhyaar, K. *et al.* (2022) 'Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa', *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), pp. 202–217. Available at: <https://ejournal.warmadewa.id/index.php/krisna/article/view/4184>.
- Arens, A. A., Elder, R. J. and Beasley, M. S. (2014) *Auditing and Assurance Service, Book1*.
- Batang, B. (2017) *Kecamatan Blado dalam Angka*. Batang.
- BATANG, P. (2013) 'PERBUP NO 37 TH 2013'. Batang.
- Bernardin, D. E. Y. and Solihat, I. (2019) 'Internal whistleblowing sebagai upaya pencegahan fraud dengan moralitas sebagai pemoderasi', *Jurnal Sain Manajemen, Vol.1 No.1 Agustus 2019*, 1(1), pp. 107–119.
- Bidiknasional (2020) 'No Title', 30 December. Available at: <https://bidiknasional.com/2020/12/diduga-korupsi-dana-desa-mantan-kades-ditangkap-polisi/>.
- Endrik, A. (2017) 'RJOAS, 5(65), May 2017', 5(May), pp. 107–115.
- Fajar, I. (2016) 'Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal dengan coso'.
- Gaurina, N. P. M., Purnamawati, I. G. A. and Atmadja, A. T. (2017) 'Pengaruh persepsi karyawan mengenai perilaku etis dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud (studi kasus pada Bali Hai Cruises)', *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 8(2 Tahun 2017), pp. 1–9.
- hindayati mustafidah, M.Kom, suwarsito, M. S. (2020) *dasar dasar metodologi penelitian*. 1st edn. Edited by totok haryanto. purwokerto: um purwokerto press.
- ICW and Indonesia (2018) *Lonjakan Korupsi di Desa / ICW, indonesia corruption watch*. Available at: <https://www.antikorupsi.org/id/article/lonjakan-korupsi-di-desa> (Accessed: 15 December 2021).

- Inawati, W. A. and Sabila, F. H. (2021) 'Pencegahan Fraud: Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah', *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), p. 731. doi: 10.24843/eja.2021.v31.i03.p16.
- Ir. Syofian Siregar, M. . (2013a) *metode penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan spss*. 1st edn. JAKARTA: kencana prenada media group.
- Ir. Syofian Siregar, M. . (2013b) *metode penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*. jakarta: prenada media.
- Ir. Syofian Siregar, M. . (2013c) *metode penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*. 1st edn. Edited by prenada media. Jakarta.
- Jayanti, L. S. I. D. and Suardana, K. A. (2019) 'Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa', *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), p. 1117. doi: 10.24843/eja.2019.v29.i03.p16.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2008) 'Pedoman 2008', p. 3. Available at: <http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-WBS.pdf>.
- Kristanti (2018) 'Pengaruh Personal Cost dan Lingkungan Etika terhadap Niat Melakukan Whistleblowing dengan Locus Of Control sebagai Variabel Moderasi', pp. 84–92.
- Kurniawan, P. C. and Izzaty, K. N. (2019) 'PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGENDALIAN Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang terjadi karena ada faktor tekanan , kesempatan (peluang), dan rasionalisasi yang dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya yang bera', 1(1), pp. 55–60.
- Langoday, katarina S. M. E. (2021) 'PENGARUH WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN'.
- Ngatno (2015) 'Buku Ajar Metodologi', p. 47. Available at: https://doc-pak.undip.ac.id/331/1/BUKU_AJAR_METODOLOGI_PENELITIAN.pdf.
- Noviani, D. P. and Sambharakreshna, Y. (2014) 'Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan', *JAFFA Oktober*, 02(2), pp. 61–70.
- Nur Cahyo, M. and Sulhani, S. (2017) 'Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System,

- Pengungkapan Kecurangan dan Reaksi Pasar’, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), pp. 249–270. doi: 10.24815/jdab.v4i2.7704.
- Octaviari, V. (2015) ‘Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Perilaku Etis Sebagai Variabel Intervening Pada Pt Pagilaran’, *Skripsi*, 151, p. 167.
- Puspitarani, D. *et al.* (2019) ‘PENGARUH IC DAN SOP TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DENGAN PENALARAN ETIS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)’.
- Rahadi, D. R. and Farid, M. M. (2021) *Monograf Analisis Variabel Moderating*.
- Rahimah¹⁾, L. N., Murni²⁾, Y. and Lysandra³⁾, S. (2018) ‘PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DESA, LINGKUNGAN PENGENDALIAN dan MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD YANG TERJADI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaesmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan’, 42(1), pp. 31–41.
- Regina Azaria (2020) ‘Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, moralitas, system pengendalian internal dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa (studi empiris aparat pemerinta desa kabupaten kodus)’, (July), pp. 1–23.
- Romadaniati (2020) ‘Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi THE INFLUENCE OF VILLAGE APARATURE COMPETENCE , INTERNAL CONTROL SYSTEM AND WHISTLEBLOWING SYSTEM ON FRAUD PREVENTION IN VILLAGE GOVERNMENT WI ...’, (October).
- rozmita dewi yr (2017) *fraud, penyebab dan pencegahannya*. 1st edn. bandung: alfabeta cv.
- Saifuddin (2017) ‘Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia’, *Az Zarqa*, 9(2), pp. 256–277.
- Sandityas, Y., Ngumar, S. and Riharjo, I. B. (2018) ‘Faktor-Faktor Penentu Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Pemoderasi’, *Academia.Edu*. Available at: https://www.academia.edu/download/56057412/PUBLIKASI_KARYA_ILMIAH_YULIUS_SANDITYAS.pdf.
- Satria, M. R. (2020) ‘Pengaruh Lingkungan Pengendalian Dan Penilaian Risiko Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Pstnt Batan Bandung’,

- Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), pp. 165–169. doi: 10.31294/moneter.v7i2.8515.
- Siregar, M. I. S. (2013) ‘data dan pengumpulan data’, in *metode penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan spss. pertama*. jakarta, p. 21.
- Somers, M. and Casal, J. C. (2011) ‘Type of wrongdoing and whistle-blowing: Further evidence that type of wrongdoing affects the whistle-blowing process’, *Public Personnel Management*, 40(2), pp. 151–163. doi: 10.1177/009102601104000205.
- Sudaryono, D. (2017a) ‘metodologi penelitian’, in *metodologi penelitian*. jakarta: PT RajaGrafindo, p. 92.
- Sudaryono, D. (2017b) ‘metodologi penelitian’, in *metodologi penelitian*. 1st edn. jakarta: PT RajaGrafindo, p. 167.
- Sudaryono, D. (2017c) ‘metodologi penelitian’, in *metodologi penelitian*. 1st edn. jakarta: PT RajaGrafindo, p. 155.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S. and Laksmi, P. S. P. (2020) ‘Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar’, *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), p. 2780. doi: 10.24843/eja.2020.v30.i11.p06.
- Suradi (2014) *KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM, KEMENKEU*. Available at: <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-kepemimpinan-magelang-korupsi-menurut-hukum-islam-2019-11-05-9bb24de7/> (Accessed: 26 December 2021).
- Utami, K. D., Utami, I. and Hapsari, A. N. S. (2019) ‘Whistleblowing pengelolaan dana desa: studi atas nilai kearifan lokal’, *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(17), pp. 571–579.
- Wardana, I. G. A. K., Sujana, E. and Wahyuni, M. A. (2017) ‘Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng’, *E-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), pp. 1–10.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T. and Atmadja, A. T. (2017) ‘Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng)’, *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), pp. 1–12.

Wijayanti, P. and Hanafi, R. (2018) 'Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), pp. 331–345.

William R Scott (2019) 'Agency Theory (William R Scott) Dalam', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.

Zarefar, A., Bisnis, T. A.-J. A. K. D. and 2017, undefined (2017) 'Efektifitas Whistleblowing System Internal', *Jurnal.Pcr.Ac.Id*, 10(2), pp. 25–33. Available at: <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/1562>.